

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan agar dapat menggali dan memperdayakan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan bagi daerah. Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemudian, keluar pengaturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 27 tahun 2013) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, yang akan menggantikan Permendagri nomor 37 tahun 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Laporan keuangan dalam hal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program atau kegiatan, kemajuan realisasi

pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan.

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, Provinsi Nusa Tenggara Timur memikul suatu tugas untuk memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri.

Berikut adalah data APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017.

Tabel 1.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2015–2017

No	Uraian	TahunAnggaran2015			TahunAnggaran2016			TahunAnggaran2017		
		AnggaranS etelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran SetelahPerub ahan	Realisasi	%	AnggaranS etelah Perubahan	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	3.353.173.473.800	3.315.669.415.296	98,88	3.708.327.498.000	3.875.554.164.669	104,51	4.797.226.620.000	4.700.213.492.589	97,98
1.1	Pendapatan Asli Daerah	872.546.745.800	882.315.240.378	101,12	1.003.412.656.000	995.186.120.952	99,18	1.016.023.429.000	1.047.491.567.026	103,10
1.2.1	DanaPerimbangan	1.512.721.680.000	1.461.922.422.707,00	96,64	2.633.565.291.000,00	2.839.657.758.567,00	107,83	3.761.940.062.000,00	3.644.692.862.110,00	96,88
1.3	Lain-lainPendapatan Daerah yangSah	967.905.048.000	971.431.752.211,00	100,36	44.501.952.000,00	39.273.140.725,00	88,25	18.363.129.000,00	9.028.418.453,00	49,17
5	BELANJA DAERAH	3.523.978.561.028	3.328.496.113.665	94,45	3.816.240.501.789	3.702.912.449.649	97,03	5.008.145.707.768	4.643.876.188.617	92,73
5.1	BelanjaOperasi	2.455.553.279.681	2.375.602.489.709	96,74	2.779.225.133	2.733.228.957.059	98,34	3.869.718.130.510	3.692.798.605.170	94,76
5.2	BelanjaModal	696.852.477.347	606.702.214.577	87,06	633.202.476.402	602.299.044.635	95,12	605.402.548.924	482.954.604.340	79,77
	Belanjatidakterduga	7.500.000.000	1.050.797.527	14,01	2.000.000.000,00	1.149.407.500,00	57,47	4.900.000.000	56.266.315	1,15
	Transfer		-	-		-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit	(170.805.087.228)	(12.826.698.369)	7,51	(107.913.003.789)	172.641.715.020	159,98	(210.919.087.768)	65.337.303.972	30,98
6	PEMBIAYAAN	170.805.087.228	171.552.722.158	100,44	111.296.492.789	110.246.903.748	99,06	210.919.087.768	208.239.521.193	98,73
6.1	Penerimaan Pembiayaan	255.505.087.228	254.559.322.158	99,63	166.296.492.789	165.206.703.748	99,34	290.459.087.768	287.775.321.193	99,08
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	84.700.000.000	83.006.600.000	98,00	55.000.000.000	54.959.800.000	99,93	79.540.000.000	79.535.800.000	99,99
	PembiayaanNeto	170.805.087.228	171.552.722.158	100,44	111.296.492.789	110.246.903.748	99,06	210.919.087.768	208.239.521.193	98,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA)	-	158.726.023.789	-	3.383.489.000	282.888.618.768	0,00	-	273.576.825.165	-

Sumber:Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat pada tahun 2015 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 3.315.669.415.296 kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.862.468.586.371 dan pada tahun 2017 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 4.715.481.775.278.

Pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.328.496.113.665 kemudian tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 3.694.626.516.006 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.672.334.394.193.

Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/ pendapatan terbesar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dana perimbangan dari Pemerintah pusat dimana pada tahun 2015 dana perimbangannya sebesar Rp 1.461.922.422.707, pada tahun 2016 Rp. 2.839.657.758.567 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.644.692.862.110. sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari total dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2015 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 882.315.240.378, tahun 2016 sebesar Rp. 983.537.687.079 dan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.061.760.494.715.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran daerah dan belum mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul sebagai berikut “**Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut “Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.

b. Sebagai wahana untuk melatih berpikir secara alamiah dalam bidang Akuntansi Keuangan Daerah yang khususnya berkaitan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan menjadi referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian sejenis.